

**ANALISIS TERHADAP PENGATURAN PENANAMAN MODAL
SEKTOR PERTAMBANGAN DI INDONESIA**

TESIS

**Untuk Memenuhi Sebagian Persyaratan Mencapai
Derajat Magister Program Studi Ilmu Hukum**

Minat Utama : Hukum Bisnis



DISUSUN OLEH :

MULFACHRI HARAHAHAP

NIM S 32050617

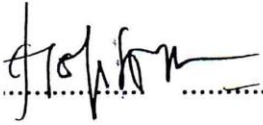
**PROGRAM PASCASARJANA
UNIVERSITAS SEBELAS MARET
SURAKARTA
2015**

commit to user

**ANALISIS TERHADAP PENGATURAN PENANAMAN MODAL
SEKTOR PERTAMBANGAN DI INDONESIA**

DISUSUN OLEH :
MULFACHRI HARAHAP
NIM S 320306017

Telah Disetujui oleh Tim Pembimbing :
Dewan Pembimbing

Jabatan	Nama	Tanda Tangan	Tanggal
Pembimbing	Prof. Dr. Adi Sulistiyono, S.H., M.H. NIP. 19630209 198803 1 003	

Mengetahui,

Kepala Program Studi Magister Ilmu Hukum



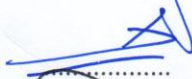
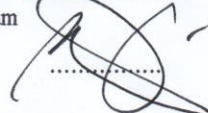


Dr. Hari Purwadi, S.H., M.Hum.,
NIP. 19641201 200501 1 001


ANALISIS TERHADAP PENGATURAN PENANAMAN MODAL
SEKTOR PERTAMBANGAN DI INDONESIA

DISUSUN OLEH :
MULFACHRI HARAHAP
NIM S2 320306017

Telah Disetujui Oleh Tim Penguji

Jabatan	Nama	Tanda Tangan	Tanggal
Ketua	Dr. Hari Purwadi, SH.MHum NIP. 196412012005011001	
Sekretaris	Dr. I Gusti Ayu K.R.H, SH. MM NIP. 197210082005012001	
Anggota	Dr. M. Hudi Asrori S, SH.MHum NIP. 196011071989111001		25/11/2015
	Dr. Al Sentot Sudarwanto, SH.MHum NIP. 195911271986011004	

Mengetahui

Direktur Program
Pascasarjana

Prof. Dr. M. Furqon Hidayatullah, M.Pd
NIP. 1960072719870221001

Kepala Program Studi Magister
Ilmu Hukum

Dr. Hari Purwadi, SH.MHum
NIP. 196412012005011001

PERNYATAAN

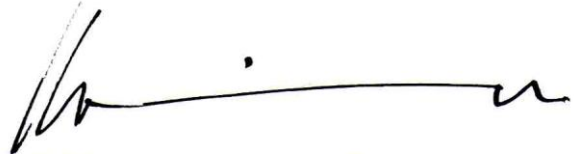
Nama : MULFACHRI HARAHAP
NIM : S 320506017

Menyatakan dengan sesungguhnya bahwa tesis berjudul **ANALISIS TERHADAP PENGATURAN PENANAMAN MODAL SEKTOR PERTAMBANGAN DI INDONESIA** adalah betul-betul karya saya sendiri. Hal yang bukan karya dalam tesis tersebut diberi tanda *citasi* dan ditunjukkan dalam daftar pustaka.

Apabila dikemudian hari terbukti saya tidak benar, maka saya bersedia menerima sanksi akademik, berupa pencabutan tesis dan gelar yang saya peroleh dari tesis tersebut.

Surakarta, 28 Oktober 2015

Yang Membuat Pernyataan,



MULFACHRI HARAHAP

KATA PENGANTAR

Segala puji dan syukur hanya milik Allah SWT yang telah melimpahkan begitu banyak nikmat-Nya sehingga tesis yang berjudul **“ANALISIS TERHADAP PENGATURAN PENANAMAN MODAL SEKTOR PERTAMBANGAN DI INDONESIA”** ini dapat penulis selesaikan tepat pada waktunya guna memenuhi sebagian persyaratan mencapai derajat Magister Program Studi Ilmu Hukum Universitas Sebelas Maret Surakarta.

Tesis ini membahas tentang pengaturan kerjasama penanaman modal asing sektor pertambangan dengan mengacu pada Undang-Undang No.25 Tahun 2007 tentang Penanaman Modal dan Undang-Undang No.4 Tahun 2009 tentang Mineral dan Batubara.

Pada kesempatan ini ijin, penulis juga bermaksud menyampaikan ucapan terima kasih kepada semua pihak yang telah membantu penulis baik secara materiil maupun moril sehingga penulisan tesis ini dapat terselesaikan dengan baik dan lancar terutama kepada:

1. Bapak Prof.Dr.Ravik Kasidi, MS, selaku Rektor Universitas Sebelas Maret Surakarta.
2. Bapak Prof.Dr.Furqon Hidayatullah, MPd., selaku Direktur Program Pascasarjana Universitas Sebelas Maret Surakarta.
3. Bapak Prof. Dr. Supanto, SH, M.Hum, selaku Dekan Fakultas Hukum Universitas Sebelas Maret Surakarta.
4. Bapak Dr. Hari Purwadi, S.H., M.Hum selaku Ketua Program Studi Magister Ilmu Hukum Universitas Sebelas Maret Surakarta.
5. Bapak Prof. Dr. Adi Sulistiyono, S.H.,M.H selaku pembimbing penelitian tesis yang memberikan bimbingan, arahan dan kemerdekaan berpikir bagi peneliti dalam proses penyusunan hingga penyelesaian penelitian tesis ini.
6. Bapak dan Ibu Dosen Program Studi Ilmu Hukum Pascasarjana Ilmu Hukum Universitas Sebelas Maret Surakarta.
7. Ayahanda dan Ibunda yang telah mendidiku untuk dapat menjadi insan yang bertaqwa dan berguna dalam kehidupan ini.
8. Isteri dan Anak-anakku atas segala doa, dukungan dan bantuannya.

commit to user

9. Rekan-rekan Angkatan Tahun 2006 pada Program Studi Ilmu Hukum Program Pasca Sarjana Universitas Sebelas Maret Surakarta atas segala bantuan dan kerja samanya.
10. Semua pihak yang belum penulis sebutkan dalam kesempatan ini, terima kasih atas segala bantuannya.

Semoga tesis ini bermanfaat bagi siapapun pembacanya dan menjadi amal baik bagi peneliti, ayah ibu peneliti dan amal baik setiap orang yang membantu penyusunan tesis ini. Amiin.

Surakarta, 28 Oktober 2015

MULFACHRI HARAHAAP
NIM : S 320506001

DAFTAR ISI

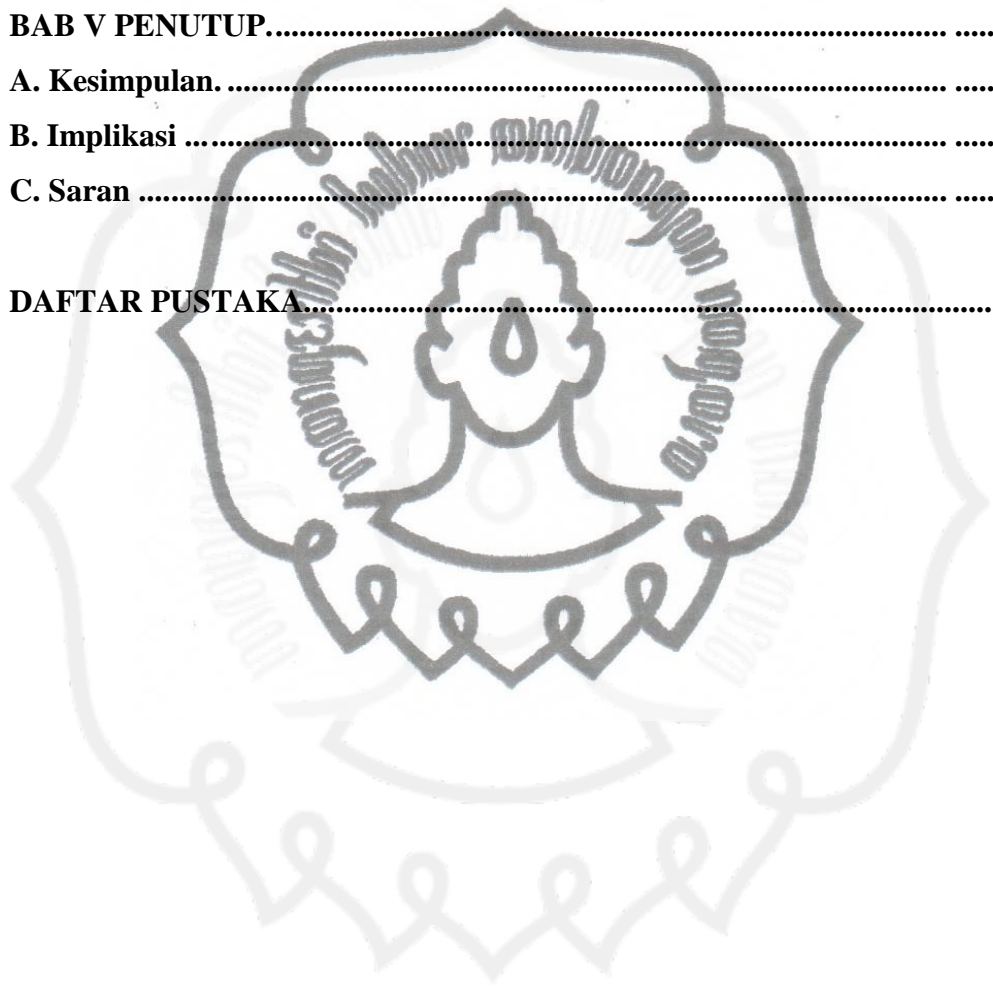
	Halaman
HALAMAN JUDUL	i
HALAMAN PENGESAHAN PEMBIMBING.....	ii
HALAMAN PENGESAHAN TESIS	iii
PERNYATAAN.....	iv
KATA PENGANTAR.....	v
DAFTAR ISI.....	vii
DAFTAR TABEL	x
DAFTAR SINGKATAN	xi
ABSTRAK INDONESIA.....	x
ABSTRAK INGGRIS.....	xi
BAB I PENDAHULUAN.....	1
A. Latar Belakang Masalah.....	1
B. Perumusan Masalah.....	7
C. Tujuan Penelitian.....	8
D. Manfaat Penelitian.....	8
BAB II LANDASAN TEORI	9
A. Kerangka Teoritik	9
1. Tinjauan Umum tentang Perjanjian	9
2. Tinjauan Umum tentang Pertambangan.....	22
3. Tinjauan Umum tentang Penanaman Modal.....	34
4. Tinjauan Umum tentang Hak Menguasai Negara.....	35
5. Tinjauan Umum tentang Sistem Hukum.....	46
B. Penelitian Yang Relevan.....	50
C. Kerangka Berpikir	51

BAB III METODE PENELITIAN..	53
A. Jenis Penelitian.....	53
B. Jenis Data dan Sumber Data.....	54
C. Teknik Pengumpulan Data	55
D. Teknik Analisis Data	56
BAB IV HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN	58
A. Pengaturan Kerja sama Penanaman Modal Sektor Pertambangan.....	58
1. Hasil Penelitian Pengaturan Kerja sama Penanaman Modal Sektor Pertambangan.....	58
a. Kontrak kerja sama Penanaman Modal Sektor Pertambangan.	58
b. Pengaturan tentang Pengakhiran Kerja sama.....	61
c. Pengaturan tentang Tanggung Jawab Sosial Perusahaan	63
d. Pengaturan Pertambangan Terjadi Tumpang Tindih	69
2. Analisis Pengaturan Kerjasama Pertambangan Dengan Teori Sistem Hukum	70
a. Substansi Peraturan Perundang-Undangan	71
1) Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2001 tentang Minyak dan Gas Bumi	71
2) Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2009 tentang Pertambangan Mineral dan Batubara	74
3) Perbandingan UU No.11 Th 1967 dengan UU No.4 Th 2009.....	78
b. Aparatur Hukum Dalam Kontrak Kerjasama Pertambangan.....	85
1) Kementerian Energi Sumber Daya Mineral.....	85
2) Badan Pelaksana Minyak dan Gas Bumi.....	86
c. Budaya Hukum Dalam Pengelolaan Pertambangan Rakyat	87
B. Faktor-faktor Yang Mempengaruhi Pengaturan Penanaman Modal Sektor Pertambangan	91
1. Hasil Penelitian Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Pengaturan Penanaman Modal Sektor Pertambangan.....	91

commit to user

- a. Faktor Konstitusi: Pasal 33 ayat (3) UUD 1945 Multi Tafsir. 91
- b. Faktor Politik Hukum97
- c. Faktor Liberalisasi Ekonomi108
- 2. Analisis Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Pengaturan
 Penanaman Modal Sektor Pertambangan 110

- BAB V PENUTUP..... 114**
- A. Kesimpulan..... 114**
- B. Implikasi 115**
- C. Saran 116**
- DAFTAR PUSTAKA..... 117**



DAFTAR TABEL

Tabel 1 Perbandingan Penelitian Terdahulu51
Tabel 2 Perbandingan UU No.11/1967 dan UU 4/2009..... 83
Tabel 3 Perbandingan Sistem Perijinan Dan Sistem Kontrak..... 87
Tabel 4 Kewenangan Pengelolaan Minerba.....88



DAFTAR SINGKATAN

BKPM	Badan Koordinasi Penanaman Modal
BW	<i>Burgelijk Wetboek</i>
BRv	<i>Reglemnet op de Burgelijk Rechtsvoordering</i>
HAM	Hak Asasi Manusia
HIR	Herzeini Inlands Reglement
KK	Kontrak Karya
KUHAP	Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana
KUHPerdata	Kita Undang-Undang Hukum Perdata
Minerba	Mineral dan Batubara
PMA	Penanaman Modal Asing
PMDN	Penanaman Modal Dalam Negeri
Perpu	Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang
RUPS	Rapat Umum Pemegang Saham
UUD 1945	Undang-Undang Dasar 1945
UUD 1950	Undang-Undang Dasar Sementara 1950

ABSTRAK

Mulfachri Harahap, S320506017, 2006, Analisis Terhadap Pengaturan Penanaman Modal Sektor Pertambangan di Indonesia, Tesis : Pascasarjana Program Studi Ilmu Hukum Universitas Sebelas Maret Surakarta.

Penelitian ini bertujuan mendeskripsikan dan menganalisis substansi pengaturan penanaman modal sektor pertambangan. Selain itu, juga bertujuan Menganalisis faktor-faktor yang mempengaruhi kerjasama penanaman modal dalam sektor pertambangan di Indonesia.

Berdasarkan jenisnya penelitian ini merupakan penelitian hukum normatif atau doktrinal yang mengacu pada sumber data sekunder. Penelitian yang dilakukan ini adalah penelitian yang bersifat deskriptif untuk memberikan data yang seteliti mungkin tentang manusia, keadaan atau gejala-gejala lainnya. Teknik pengumpulan data dilakukan dengan studi kepustakaan untuk mengumpulkan dan menyusun data yang berhubungan dengan masalah yang diteliti. Dalam penulisan ini menggunakan logika deduksi yakni menarik kesimpulan dari suatu permasalahan yang bersifat umum terhadap permasalahan konkret yang dihadapi. Analisis data dilakukan secara kualitatif dengan pendekatan perundang-undangan.

Hasil penelitian dan pembahasan penelitian ini menunjukkan bahwa pengaturan kerjasama penanaman modal asing sektor pertambangan dicantumkan dalam suatu perjanjian. Substansinya ditentukan para pihak yang membuat perjanjian. Dalam perjanjian tersebut harus memperhatikan beberapa faktor antara lain kelestarian lingkungan dan tanggung jawab sosial perusahaan. Pada saat undang-undang yang terakhir ditetapkan sebagai dasar pengaturan pertambangan, khususnya pertambangan mineral dan batu bara adalah Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2009 tentang Pertambangan Mineral dan Batubara. Jika ditelusuri terhadap pengaturan kerjasama pertambangan, pada dasarnya belum sepenuhnya sesuai dengan aspirasi masyarakat. Hal ini disebabkan karena sistem hukum pertambangan lebih berpihak kepada investor dan belum sepenuhnya mengakui hak-hak adat masyarakat. Selain itu, terdapat satu peraturan perundang-undangan yang secara khusus mengatur tentang tata cara pengakhiran tambang yang lengkap dan komprehensif. Sehingga pengusaha-pengusaha tambang yang melakukan aktivitas investasinya di Indonesia mengalami kesulitan dalam menentukan dasar hukum yang relevan. Hal mana dikarenakan pengaturan tambang di atur secara terpisah dalam perangkat peraturan yang dikeluarkan oleh departemen dan instansi pemerintah yang berbeda. Faktor-faktor yang mempengaruhi dalam kerjasama pertambangan, antara lain faktor konstitusi, politik hukum dan liberalisasi ekonomi.

Implikasi dri penelitian ini adalah bahwa pengaturan kerjasama penanaman modal asing sector pertambangan dalam sistem hukum Indonesia membuka wawasan dan pemikiran bagi dilakukannya pembahuan hukum mineral dan batubara yang lebih *reliable* dan *predictable*

Kata Kunci: Pengaturan, Penanaman Modal, Pertambangan

commit to user

ABSTRAC

Mulfachri Harahap, S320506017, 2006, Analysis Of Regulation Foreign Direct Investment Minning In Indonesia, Thesis : Post Graduate Program, Sebelas Maret University Surakarta.

This research aims to describe and analyze the substance of the arrangements of the mining capital sector. Futhermore, it also aims to analyze the factors that affect the cooperation of the mining sector in Indonesia.

Based on the type of research, this is a normative law research on a doctrine that refers to the source of secondary data, and tertier as the supporting data. The study which is done is a study that is descriptive. The technique for collecting data is done with literature study to collect and compile data associated with problems that are examined. This study uses a logical deduction which is drawing a conclusion from a problem that common towards the concrete problem that is faced. The data analysis is with a Statute Approach (an approach towards the regulations) by using Comparative research.

The result and focus of this study is the arrangement of cooperation amongst investors in the mining sector to be included in the agreement. The substance is determined by the party who created the agreement. The agreement should regard a few factors which are the environmental sustainability and social responsibility of the company. When the newest regulation has been assigned as a basic law of mining, specifically in mineral and coal mining which is Law No 2 in 2009 regarding the Mining of Coal and Mineral. If it is connected to the cooperation in mining, is basically not entirely suitable with the aspirations of the community. This is cause by the mining laws preferring the investors and does not entirely admit the rights of indigenious people. Other than that, there isn't one constitutional law that specifically arrange the regulations of mining closures that is complete and comprehensive, so that the mining investors who are dong their activities in Indonesia have some difficulty in choosing the basic law which is relevant. This is caused by the regulations in mining which are separately organized in the tools of refulations that is issued by the different departments and government agencies. The factors that affect the cooperation in mining, among them are constitutional factors, political law, and the liberalization of economy.

The implication of this research is that the concept of the cooperation foreign direct investment of minning in the Indonesian legal system have provoke a thoughtof reforming the regulation minning to become reliable and predictable.

Keywords: Regulasi, Direct Investment, Minning